# Konsep Desain Kantor Bupati Daerah Otonomi Baru (DOB) Kutai Tengah

**Al Priyadi Hidayat[1], Broto Wahyono Sulistyo[2]**
[1]Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
[2]Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
Email: [1] aphidayat61@gmail.com

***Abstract.*** *To carry out a "new autonomous region" expansion program or abbreviated as DOB Central Kutai requires administrative preparations and physically covers areas that will be part of the government, sufficient population, and buildings which will later become places for government management led by government The Regent with all his ownership belongs to the state. The regent's office building is an absolute necessity as a place of work or a symbol of the area, buildings with floating architectural systems that are designed in swampy areas with a certain time will experience very high floods and long flooding duration even up to 2 months which can result in the cessation of activities the economy and activities of the local community, indirectly the function and impact of the building in a sustainable manner. The organizational pattern in the building is a centralized formation to clarify the circulation of officials in the office building of the regent, the people who carry out the administration process and the guest of honor. In the building will also apply a dynamic design friendly to visitors.*
***Keywords:*** *Sustainable, Dynamic, Regent's Office, Central Kutai, Rawa, Floating.*

***Abstrak.*** *Untuk menjalankan sebuah program pemekaran daerah otonomi baru atau disingkat menjadi DOB Kutai Tengah memerlukan persiapan dari segi administratif dan secara fisik mencakup daerah yang akan menjadi bagian dari pemerintahan, jumlah penduduk yang mencukupi, maupun bangunan yang nantinya akan menjadi tempat kepengurusan pemerintah yang dipimpin oleh Bupati dengan segala kepemilikannya adalah milik negara. Bangunan kantor bupati merupakan hal mutlak yang diperlukan sebagai tempat bekerja maupun menjadi simbol dari daerah tersebut, bangunan dengan sistem arsitektur terapung yang didesain pada daerah rawa dengan waktu tertentu akan mengalami banjir yang sangat tinggi dan durasi banjir lama bahkan hingga 2 bulan yang dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan perekonomian dan kegiatan masyarakat setempat, secara tidak langsung fungsi dan dampak dari bangunan dengan berkelanjutan. Pola organisasi pada bangunan yaitu bentukan terpusat untuk memperjelas sirkulasi pejabat pada bangunan kantor bupati, masyarakat yang melakukan proses administrasi maupun tamu kehormatan. Pada bangunan juga akan menerapkan bentukan dinamis yang ramah kepada pengunjung.*
***Kata Kunci:*** *Berkelanjutan, Dinamis, Kantor Bupati, Kutai Tengah, Rawa, Terapung.*

## 1. Pendahuluan

Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu daerah baru yang segala kepengurusan daerah secara mandiri dari 6 Kecamatan bagian dari kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yaitu Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Kenohan, Kembang Janggut, dan Tabang menjadi DOB Kutai Tengah ini sebenarnya sudah bergulir sejak tahun 2000 silam mengikuti beberapa Kabupaten lainnya yang telah melakukan pemekaran, kemudian pada tahun 2003 tim pemekaran dibentuk, terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda, agama dan beberapa kepala desa. Selanjutnya pada 2005, Bupati Kukar saat itu, Syaukani HR beserta pihak Kesultanan Ing Martadipura menyetujui pembentukan DOB ini. Hingga saat ini segala hal yang menyangkut persyaratan administratif sedang dilaksanakan karena beberapa regulasi dari perundang-undangan terbaru yang perlu dipenuhi. Selain persyaratan administratif ada juga persyaratan secara fisik yaitu luas daerah, jumlah penduduk, dan tak luput dari persyaratan-persyaratan tersebut adalah Kantor Pusat Pemerintah Kabupaten yang menjadi sarana untuk melakukan segala urusan pemerintahan yang sangat kompleks, terstruktur, dan terencana. Pemilihan Kota Bangun sebagai ibukota, karena berada ditengah-tengah enam kecamatan, memiliki pelabuhan, memiliki rumah sakit, terminal dan beberapa bank kantor cabang di Kota Bangun (korankaltim.com / 2017). Kawasan Kecamatan Kota Bangun sebagian berbukit, rawa dan perairan (sungai, danau), area Kota Bangun sendiri sering mengalami banjir tahunan yang memiliki ketinggian dari 1-4 meter dari

dataran rawa serta durasi banjir hingga berbulan-bulan, yang dapat mengganggu aktivitas warga secara total.

Pemilihan karakter lahan, jika pembangunan pada perbukitan hal yang sering dilakukan berdasarkan fakta adalah perluasan lahan menggunakan cara *cut & fill* dalam arti lain yaitu 'pengerusakan alam' tentu saja ini akan menjadi pertentangan ketika isu-isu kebakaran hutan karena perluasan lahan semakin marak sehingga opsi ini tidak dilakukan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pembangunan kantor berada di atas dataran yang mengapung seperti ponton raksasa (tongkang) sehingga dapat menjadi solusi, yang nantinya bangunan akan responsif terhadap segala kondisi alam dan bersahabat dengan alam.

### 1.1. Tinjauan Pustaka

Beberapa tinjauan pustaka terkait arsitektur terapung, diketahui bahwa *British Columbia Float Home Standard*, adalah Standar Rumah Terapung mencakup desain dan konstruksi rumah terapung sebagaimana didefinisikan dalam standar, dan kebutuhan akan perlindungan terhadap api baik rumah terapung di mana rumah terapung ditambatkan. Di sisi yang lain, *Remistudio's Massive Floating Ark Battles Rising Tides*, adalah firma arsitektur Rusia Remistudio yang merancang konsep bangunan besar yang dapat tahan terhadap banjir ekstrem. Memiliki struktur yang memungkinkannya mengapung dan secara mandiri di permukaan air. The Ark juga dirancang untuk menjadi rumah bioklimatik dengan sistem pendukung kehidupan yang independen.

Telaah terhadap kantor bupati juga didapati bahwa pengertian Kantor Bupati DOB Kutai Tengah yang diperoleh dari uraian tentang Kantor Bupati yang merupakan bangunan gedung negara berdasarkan dari (Pasal 1 Ayat 1 Perpres no 73/2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara). Arsitektur terapung menjadi pendekatan antara fungsi pengelolaan pemerintahan dan peran pemerintah menjaga keseimbangan alam. Sedangkan, pada perihal penyelenggaraan pemerintahan daerah, didapati suatu Azas-azas penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Azas Dasntralisasi; Azas Dekonsentrasi; Azas Tugas Pembantuan. Serta otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Di samping itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah juga terdapat otonomi daerah, yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah, perlu pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota, menyatakan pada Pasal 1 ayat (3) yaitu "Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota". Kemudian pada Pasal 13 ayat (2) terdapat pengertian tipe dari Sekretariat daerah yaitu "Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat daerah dengan beban kerja yang besar, tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat daerah dengan beban kerja yang sedang, dan tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat daerah dengan beban kerja yang kecil" dalam hal ini daerah yang sedang pemekaran akan berada pada tipe B dikarenakan tingkatan pembangunan serta kepengurusan yang dapat dikatakan sedang, dengan rujukan jenis kepengurusan berdasarkan pada: Pasal 15 yaitu: (a) Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe B, terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten; (b) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian; (c) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub-bagian.

Ada juga rujukan dari Pasal 15, adalah pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19. Sebagaimana isi kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- Pasal 17 ayat (1) berisi: Asisten pada Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe A dan tipe B, terdiri atas: (a) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; (b) Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan (c) Asisten Administrasi Umum.
- Pasal 19 berisi: (1) Bagian pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe B, terdiri atas: (a) Bagian Pemerintahan; (b) Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan (c) Bagian Hukum; (2) Bagian pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat daerah

kabupaten/kota tipe B, terdiri atas: (a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; (b) Bagian Administrasi Pembangunan; dan (c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; (3) Bagian pada Asisten Administrasi Umum Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe B, terdiri atas: (a) Bagian Umum; (b) Bagian Organisasi; dan (c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Perangkat kerja daerah tentu memiliki siatu system organisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 1 ayat (3) yaitu "Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia" serta pada Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan" yang berarti pemerintah Daerah dengan Otonomi sendiri merupakan kedaulatan daerah tersebut.

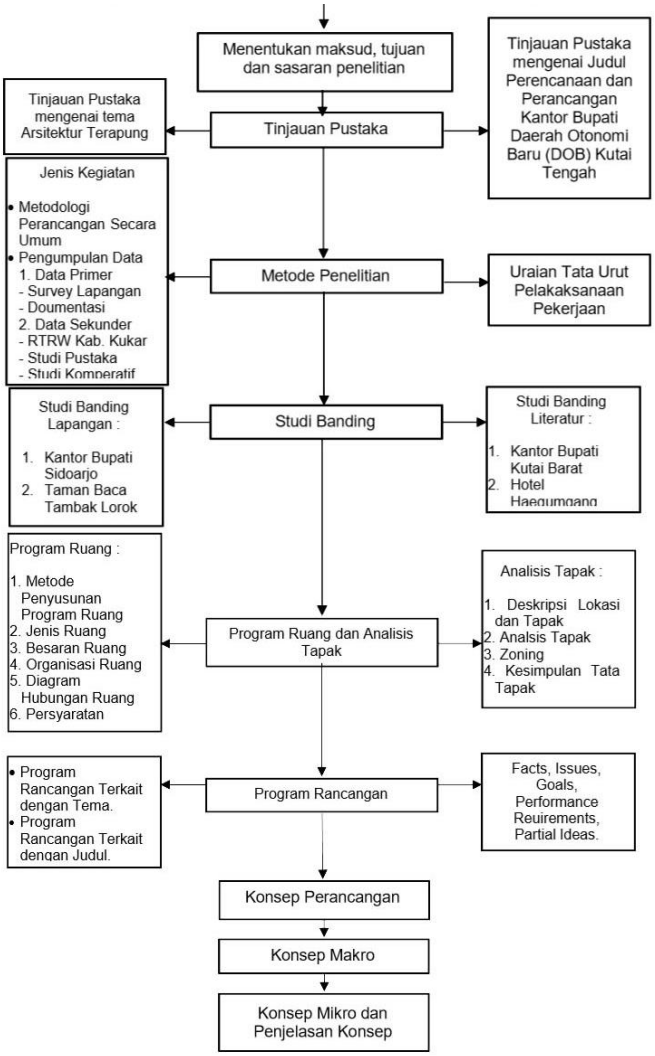
Untuk spesifikasi teknis pembangunan negara, berdasarkan Permen PU Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara membahas tentang bangunan gedung negara merupakan salah satu aset milik negara yang mempunyai nilai strategis sebagai tempat berlangsungnya proses penyelenggaraan negara yang diatur dan dikelola agar fungsional, andal, efektif, efisien, dan diselenggarakan secara tertib, serta dalam rangka pembangunan bangunan gedung negara sebagai bagian awal dari proses penyelenggaraan bangunan gedung negara yang fungsional, andal, efektif, efisien, dan diselenggarakan secara tertib, diperlukan adanya Pedoman Teknis sebagai landasan dalam penyelenggaraan pembangunannya. Dalam maksud ini dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) bahwa "Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara seperti: gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, dan rumah negara, dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah".

Dari kajian diatas diketahui bahwa dalam perancangan sebuah usaha dalam memahami, menganalisis hingga menerjemahkan berbagai kebutuhan, keinginan dan faktor penentu lain dalam menyusun strategi desain hingga dapat dilakukan perancangan yang tepat. Dalam proses kajian teori ini segala hal yang menyangkut pada perancangan tentu akan diterapkan kemudian akan mengalami analisis dengan kesesuaian kebutuhan fungsi serta luasan bangunan, serta beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam proses penerapan analisis.

## 1.2. Metode Penelitian

Bagian Kajian dalam penelitian menggunakan cara diskriptif yang mempunyai tujuan memberikan gambaran lengkap yang pada umumnya dilakukan melalui metode survey, wawancara, pengamatan, studi literatur dan lain – lain. Dengan metodologi Perencanaan dan Perancangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kantor Bupati Kutai Tengah dapat ditunjukan sebagai berikut.






**Gambar 1. Diagram Metodologi**

## 2. Pembahasan

Pembahasan ini berisi muatan mengenai proses perencanaan konsep desain, mulai dari program ruang, analisa tapak, hingga program perancangan yang menghasilkan penarikan konsep perancangan.

### 2.1. Program Ruang

Program ruang (*programming*) didefinisikan sebagai bahwa pembuatan program arsitektur adalah proses pengumpulan informasi, analisis, dan pembuatan rekomendasi untuk keberhasilan rancangan (Duerk, Donna P. 1993).

Dalam penyusunan ruang dapat dipahami bentuk ruang lebih mengikuti fungsinya. Sehingga untuk membuat suatu ruangan harus diketahui fungsi ruang, aktivitas kegiatan, dan jenis pemakaian ruang. Metode yang akan digunakan dalam penyusunan program ruang yaitu: (1) Menentukan zona area kepengurusan pemerintahan Kabupaten; (2) Jenis ruang akan diletakkan menyesuaikan pada zona tersebut; (3) Kebutuhan ruang akan dikaji dari analisa (sumber besaran, aktivitas, dan fungsi ruang); (4) Pengorganisasi ruang; (5) Menentukan hubungan ruang.

Setelah itu, penentuan jenis ruang didapatkan berdasarkan dari hasil studi lapangan dan studi literatur yang telah dikaji terbagi beberapa zona. Zona-zona tersebut sebagai berikut:

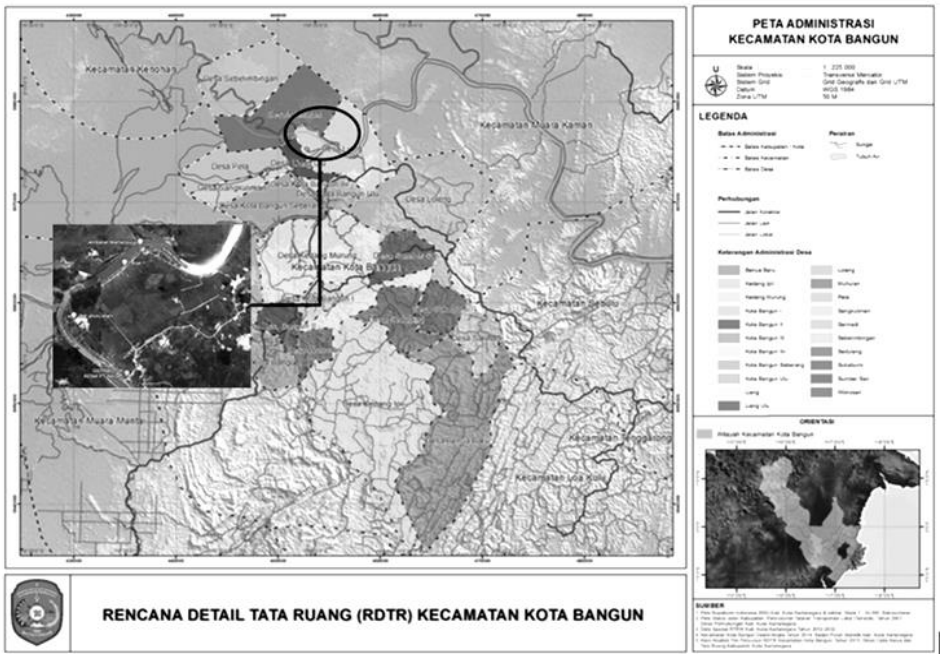
**Tabel 1. Jumlah Ruang Pada Kantor Bupati**

| No | Perangkat | Jumlah Ruang |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | Zona Inti | |
| 1 | Kantor Bupati Kutai Tengah | 77 |
| 2 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) | 58 |
| 3 | Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) | 36 |
| 4 | Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) | 50 |
| | Zona Sekunder | |
| 5 | Fasilitas Tambahan | 11 |
| 6 | Fasilitas Penunjang | 14 |
| | Zona *Service* | |
| 7 | Fasilitas Instalasi Pendukung | 18 |
| | Total | 264 |

**2.2. Analisa Tapak**

Pada perencanaan ini, lokasi tapak berada di kawasan rawa, dimana terletak di daerah Desa Liang Ulu, Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan luas lahan yang digunakan yaitu 8 Ha.




**Gambar 2. Peta Administrasi Kota Bangun**
*Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kukar*

Tata tapak pada perencanaan ini dapat disimpulkan dari beberapa pertimbangan dalam melakukan suatu proses adalah:

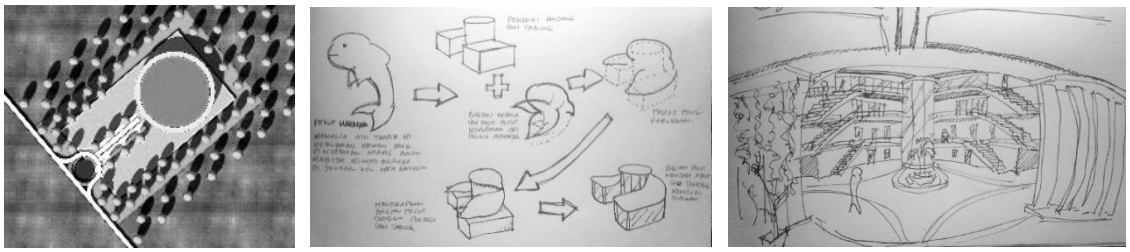
- Dari hasil kajian analisis klimatologi, penataan massa bagunan membentuk desain dinamis agar dapat merespon tekanan angin, kemudian diberikan vegetasi yang dapat mengurangi panasnya paparan sinar matahari dan memanfaatkan air hujan sebagai penyiram tanaman maupun air *service*.
- Dari hasil kajian analisis sirkulasi, maka memerlukan pola radial agar pengunjung dapat merasakan kenyamanan, terarah dan terbagi.
- Dari hasil kaijan analisis kebisingan menerapkan peredam suara pada bagian dalam bangunan dan vegetasi untuk di luar bangunan.
- Dari analisis lansekap menata hardscape dan softscape pada struktur modul ponton sebaik mungkin dan memanfaatkan tanaman di sekitar agar memiliki citra asri.
- Dari hasil kajia analisis *view to site* dan *vocal point* adalah dengan menata nodes sebaik mungkin agar menciptakan arah menuju bangunan, serta memaksimalkan bentuk bangunan.

- Dari hasil kajian *view from site* memberikan elemen lansekap lebih tertata agar terlihat indah, diberikan bukaan transparan untuk melihat dari dalam bangunan dan memberikan peneduh dari sinar matahari sore.

### 2.3. Program Perancangan

Dalam membuat program rancangan yang tepat dan terarah, maka terlebih dahulu mengidentifikasi dan menelaah makna yang berkaitan judul yakni dengan Kantor Bupati. Setelah mengaitkan dengan judul, kemudian program rancangan dikaitkan degan tema. Adapun dalam kegiatan merancang sebuah desain memerlukan suatu acuan dan batasan yang menjadi pedoman serta landasan dasar atas proses pengembangan desain. Yaitu menerapkan teori *Passive Stabilizer*, 1989: Menerapkan stabilizer pasif untuk mengurangi daya; Mengurangi penggunaan control pada modul struktur; Adaptasi terhadap gelombang dan beban.

Berdasarkan teori Donna P. Duerk, dilakukan penataan massa dan pola sirkulasi dengan system radial. Penataan tatanan massa dan pola sirkulasi dengan sistem radial, agar memudahkan dalam menuju kawasan. Membuat jalur pedestrian yang baik dan teduh, menciptakan jalur kendaraan yang baik, dan memberikan akses khusus dan mudah bagi bupati. Memberi elemen lansekap yang tahan dan ramah terhadap struktur modul ponton.



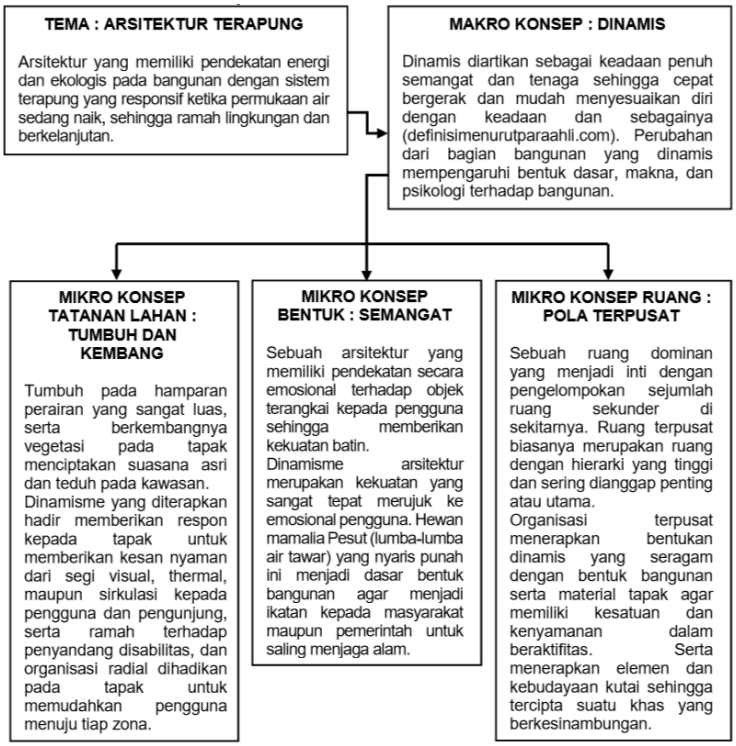
(a) (b) (c)

**Gambar 3. (a) Tatanan lahan; (b) Gubahan massa bangunan; dan (c) Penerapan interior**

Menerapkan bentukan yang mudah diingat, serta menyimbolkan sebuah semangat pembangunan daerah; Menyatukan komponen menjadi bentukan dinamis secara maksimal agar tidak monoton; Menciptakan bentukan yang *unity* terhadap bentukan lansekap; Memberikan bukaan dinding transparan agar tetap menggunakan penghawaan alami secara maksimal; Bentukan merupakan terapan dari ciri khas seperti seekor hewan mamalia pesut. Menata susunan ruang dan lantai agar menciptakan hubungan yang sesuai; Menambah unsur kebudayaan setempat, baik fisik maupun nilai-nilainya; Mengoptimalkan susunan dan fungsi ruangan pada bangunan; Mengoptimalkan persebaran cahaya pada dalam bangunan; Mengoptimalkan penghawaan di dalam bangunan.

### 2.4. Konsep Perancangan

Dari program ruang, analisa tapak, dan program perancangan, dapat ditarik suatu konsep perancangan, sebagaimana yang dapat digambarkan melalui diagram berikut.




**Gambar 4. Diagram Konsep Rancangan**

## 3. Kesimpulan

Untuk membentuk sebuah bangunan pemerintah yang sangat intim untuk dibangun sebaiknya memperhatikan persyaratan yang telah diatur dan dampak lingkungan dan nilai positif dari bangunan terhadap bangunan, serta menciptakan suasana terbaru bagi bangunan pemerintah.

## Referensi

Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitiam Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Brata, Sumadi Surya.1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali.

Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.

Lewis, Edward V. 1989. *Principles of Naval Architecture Second Revision*. New Jersey: The Society of Naval Architecture and Marine Engineers

Mus, Muhammad A. 2011. *Redesain Kantor Bupati Kabupaten Gowa (Pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular)*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.

Nasution. 2003. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.

Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sakti, Citra Gama dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kutai Kartanegara. 2015. *Review Materi Teknis RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Kecamatan Kota Bangun*. Yogyakarta: Citra Gama Sakti

Sofyan, Achmad. 2017. *Profil Daerah Kutai Barat Tahun 2017*. Kutai Barat: BP3D

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, N.S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosadakarya.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*